



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3150-3156
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Pendampingan Standardisasi Pendetailan Data Persediaan untuk
Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Persediaan pada Instansi
Pemerintah**

Widya Ayu Kusumawati¹, Khadijah², Hermaya Ompusunggu³

^{1,2,3} Universitas Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email : 231062201044@uis.ac.id¹; khadijah_mak@uis.ac.id²; Hermaya@uis.ac.id³

Abstrak

Ketidaktertiban pendetailan data persediaan merupakan persoalan yang lazim ditemukan pada instansi pemerintah, terutama dalam hal kelengkapan kode barang, kesesuaian satuan, dan klasifikasi jenis persediaan pada sistem informasi akuntansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan selisih antara saldo fisik dan saldo pada aplikasi persediaan sehingga menurunkan akurasi laporan keuangan pemerintah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan standardisasi pendetailan data persediaan guna meningkatkan akurasi pengelolaan persediaan pada instansi pemerintah mitra di Kota Batam. Metode pelaksanaan meliputi tahap survei pendahuluan, identifikasi permasalahan pencatatan persediaan, penyusunan pedoman kodifikasi dan standar pendetailan barang, pelatihan bagi pengurus barang, pendampingan input data pada aplikasi persediaan, serta evaluasi hasil pendampingan melalui uji petik (spot check) antara data fisik dan data sistem. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator akurasi data persediaan yang diukur, yaitu kelengkapan kode barang, kesesuaian satuan, keakuratan saldo stok, dan ketepatan klasifikasi, dengan rata-rata peningkatan lebih dari 30 poin persentase setelah pendampingan dilaksanakan. Pengurus barang pada instansi mitra juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap tata cara pendetailan persediaan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05. Kegiatan ini disimpulkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

Kata kunci: standardisasi data, persediaan, akuntansi pemerintahan, akurasi pengelolaan, instansi pemerintah.

***Assistance in Standardizing Inventory Data Detailing to Improve
Inventory Management Accuracy in Government Agencies***

Abstract

Inadequate detailing of inventory data is a common problem in government agencies, particularly regarding the completeness of item codes, unit consistency, and inventory classification within accounting information systems. This condition often caused discrepancies between physical stock and system records, which reduced the accuracy of government financial reports. This community service activity aimed to aid in standardizing inventory data detailing to improve inventory management accuracy at a partner government agency in Batam City. The implementation method consisted of a preliminary survey, identification of inventory recording problems, preparation of coding guidelines and item detailing standards, training for inventory officers, assistance in data input into the inventory application, and evaluation through spot checks comparing physical and system data. The

results showed a significant improvement in all measured accuracy indicators, namely item code completeness, unit consistency, stock balance accuracy, and classification precision, with an average increase of more than 30 percentage points after the assistance was implemented. Inventory officers at the partner agency also demonstrated better understanding of inventory detailing procedures in accordance with Governmental Accounting Standard Statement Number 05. This activity was concluded to provide a practical contribution to supporting the presentation of more accountable and transparent local government financial reports.

Keywords: data standardization, inventory, government accounting, management accuracy, government agency.

PENDAHULUAN

Salah satu unsur yang menentukan keandalan penyajian aset lancar pada laporan keuangan pemerintah adalah bagaimana persediaan dikelola. Hal ini menjadikan pengelolaan persediaan sebagai bagian yang krusial dalam proses penyusunan laporan tersebut. Ketika Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mulai diterapkan, setiap instansi otomatis dituntut untuk menjalankan pencatatan persediaan secara akurat, tertib, dan berkelanjutan. Sayangnya, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai di lapangan. Ketidaksesuaian kode barang, perbedaan satuan, dan kesalahan klasifikasi persediaan masih kerap ditemukan, dan ketiganya dapat memunculkan selisih antara kondisi fisik barang dengan data pada aplikasi persediaan.

Tidak sedikit penelitian yang membuktikan bahwa persoalan semacam ini masih marak terjadi di berbagai instansi pemerintah. (Ismail, Karamoy, & Pusung, 2021) bersama (Mile & Suwetja, 2022) misalnya, melalui evaluasi terhadap penerapan PSAP Nomor 05, menemukan bahwa proses pengakuan dan pengukuran persediaan pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun pendetailan serta pengungkapan datanya masih menyisakan ruang untuk perbaikan. Temuan ini diperkuat oleh (Zahra & Lukman, 2025) yang menyoroti pentingnya standarisasi prosedur pencatatan dan pemutakhiran data sebagai kunci peningkatan kualitas pengelolaan persediaan pemerintah.

Gambaran serupa juga tampak dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada instansi mitra di Kota Batam. Kode barang yang belum seragam, satuan yang tidak konsisten, kesalahan klasifikasi persediaan, sampai belum adanya standar pendetailan data yang dipakai secara konsisten oleh User Komitmen dan Operator Persediaan, menjadi beberapa persoalan yang teridentifikasi. Rangkaian persoalan ini pada gilirannya membuat proses pencatatan kurang akurat dan berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berangkat dari kondisi tersebut, tim pelaksana memandang perlu diselenggarakannya kegiatan pengabdian berupa pendampingan standarisasi pendetailan data persediaan. Penyusunan pedoman pendetailan, pelatihan, pendampingan teknis pada proses input data, serta evaluasi hasil pendampingan menjadi rangkaian kegiatan yang dijalankan, dengan harapan keseragaman pencatatan dapat tercapai, akurasi data persediaan meningkat, dan laporan keuangan pemerintah tersaji secara lebih akuntabel.

Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini digagas untuk mendampingi pengurus barang di instansi pemerintah dalam menstandarisasi pendetailan data persediaan, sehingga akurasi pengelolaannya dapat meningkat dan pola pendampingan yang diterapkan dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lain dengan karakteristik persoalan yang serupa.

METODE

Kerangka *action research*, yang terdiri atas tahap identifikasi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi, diadaptasi ke dalam pendekatan pendampingan partisipatif (*participatory mentoring*) sebagai landasan kegiatan pengabdian ini. Alasan pemilihannya sederhana: pendekatan ini memungkinkan tim pelaksana dan mitra terlibat aktif bersama dalam menuntaskan ketidaksesuaian data

pendetailan pembelian persediaan yang selama ini terjadi pada proses administrasinya. Salah satu instansi pemerintah di Kota Batam yang memiliki Unit Pengelola Persediaan dipilih sebagai lokasi kegiatan, dengan User Komitmen dan Operator Persediaan, pihak yang memegang tanggung jawab atas pencatatan dan pendetailan data pembelian persediaan sepanjang tahun 2026 turut dilibatkan secara langsung.

Dokumen administrasi pembelian persediaan yang dimiliki instansi mitra menjadi tumpuan utama sumber data, mulai dari data transaksi, rincian pendetailan barang pada aplikasi, dokumen pendukung, kartu persediaan, sampai laporan mutasi. Namun demikian, data tidak berhenti di situ; observasi lapangan, wawancara dengan personel terkait, dan hasil pendampingan yang berjalan sepanjang kegiatan turut melengkapi gambaran data yang dibutuhkan.

Tiga teknik pengumpulan data digunakan secara bersamaan agar saling menutupi kekurangan masing-masing.

1. Tim pelaksana mengamati secara langsung, melalui observasi partisipatif, bagaimana data pembelian persediaan dikelola, mulai dari penerimaan dokumen transaksi, pendetailan oleh User Komitmen, sampai pencatatan oleh Operator Persediaan. Fokusnya adalah menemukan bentuk ketidaksesuaian data, memahami alur koordinasi antartugas, serta mengurai kendala yang memunculkan selisih informasi di tiap tahapan administrasi.
2. Informasi digali lebih jauh lewat wawancara semiterstruktur bersama User Komitmen, Operator Persediaan, dan pegawai lain yang terlibat. Prosedur kerja yang berjalan, hambatan pendetailan pembelian persediaan, mekanisme koordinasi antarbagian, sampai kebutuhan mitra akan standar pendetailan yang lebih seragam menjadi fokus penggalan data ini.
3. Sebagai pelengkap, berbagai dokumen pendukung dihimpun, dokumen pembelian, rincian data pada aplikasi, kartu persediaan, laporan mutasi barang, hingga dokumen administrasi lainnya, untuk dijadikan pembandingan kesesuaian data antara User Komitmen dan Operator Persediaan, baik sebelum maupun setelah pendampingan dijalankan.

Identifikasi permasalahan menjadi titik awal pelaksanaan pendampingan, diikuti penyusunan materi dan pedoman pendetailan, sosialisasi prosedur yang benar, pendampingan teknis saat input data, hingga akhirnya monitoring dan evaluasi hasil kegiatan. Kondisi sebelum dan sesudah pendampingan dibandingkan sebagai dasar evaluasi, dengan indikator berupa kesesuaian rincian barang, ketepatan kode barang, kesesuaian satuan, dan konsistensi data antar kedua pihak. Perubahan yang terjadi digambarkan melalui analisis deskriptif atas hasil evaluasi tersebut, sekaligus mengidentifikasi manfaat yang diperoleh mitra dalam upaya meningkatkan akurasi pengelolaan data pembelian persediaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Pendetailan Data Persediaan

Berdasarkan hasil identifikasi awal, penginputan rincian data persediaan pada instansi mitra masih belum sepenuhnya memenuhi standar administrasi yang ditetapkan. Permasalahan paling banyak ditemukan pada pemberian kode barang untuk persediaan habis pakai kantor. Barang dengan jenis yang sama masih diinput menggunakan beberapa kode yang berbeda karena penentuan kode dilakukan berdasarkan penamaan barang secara bebas dan belum mengacu pada struktur kode baku dalam aplikasi persediaan. Selain itu, penggunaan satuan barang juga belum seragam. Sebagai contoh, barang cetakan yang semestinya dicatat menggunakan satuan rim pada sebagian transaksi justru diinput dalam satuan lembar. Pengelompokan persediaan ke dalam kategori barang habis pakai, barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, serta barang yang masih berada dalam proses pengadaan juga belum dilakukan secara tepat. Permasalahan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa administrasi persediaan pada berbagai instansi pemerintah masih menghadapi kendala yang berulang, khususnya

berkaitan dengan pembaruan data, standardisasi prosedur operasional pencatatan, serta pengelolaan kartu kendali barang (Zahra & Lukman, 2025) Temuan yang sejalan juga dilaporkan dalam evaluasi penerapan PSAP Nomor 05 pada sejumlah instansi vertikal, yaitu bahwa kelemahan lebih banyak ditemukan pada aspek pengungkapan rincian persediaan dibandingkan dengan aspek pengakuan maupun pengukurannya (Ismail et al., 2021; Mile & Suwetja, 2022)

Pelaksanaan Pendampingan Standardisasi

Kegiatan pendampingan diawali dengan perancangan panduan standar pendetailan data persediaan yang disusun secara bersama antara tim pelaksana dan tim pengelola barang pada instansi mitra. Panduan tersebut mencakup struktur kode barang yang terdiri atas lima segmen, yaitu kelompok barang, jenis barang, nama barang, satuan baku, serta nomor urut spesifikasi. Dengan pedoman tersebut, setiap jenis persediaan memiliki satu kode unik yang digunakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja. Setelah penyusunan pedoman selesai, seluruh pengurus barang mengikuti pelatihan klasikal yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan ketika melakukan pembaruan data persediaan pada aplikasi.

Selama kegiatan berlangsung, tim pelaksana membimbing pengurus barang untuk melakukan verifikasi kembali antara hasil stock opname dengan data yang tersedia pada sistem. Selain itu, dilakukan perbaikan terhadap penggunaan satuan barang yang belum seragam serta penyesuaian klasifikasi jenis persediaan agar sesuai dengan panduan yang telah disusun. Pendekatan pendampingan secara langsung melalui pemantauan yang dilakukan secara bertahap dinilai efektif pada kegiatan serupa yang melibatkan pelaku usaha di Kota Batam. Pemantauan intensif pada tahap awal yang kemudian dilanjutkan dengan pemantauan berkala mampu membentuk kebiasaan pencatatan yang lebih tertib di pihak mitra (Mulyana et al., 2023) Pola pendampingan tersebut juga relevan diterapkan pada instansi pemerintah karena perubahan kebiasaan administrasi memerlukan proses pembiasaan yang berkesinambungan dan tidak cukup dicapai melalui pelatihan satu kali.

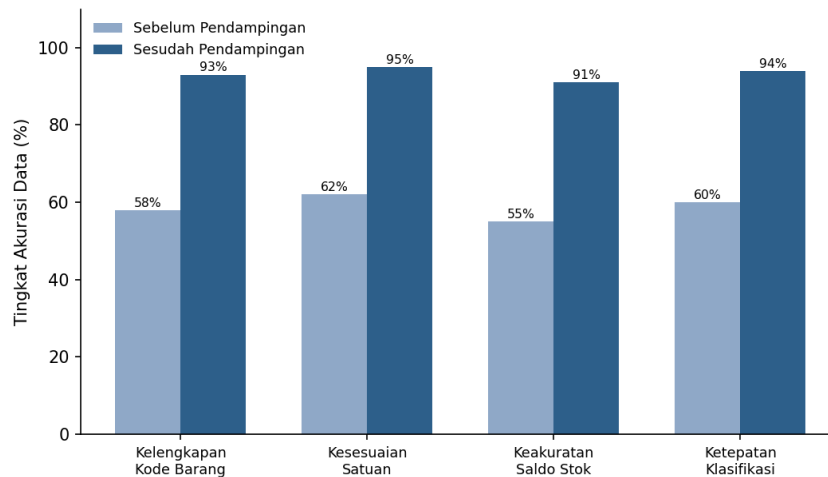
Tabel 1. Tingkat Akurasi Data Persediaan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No.	Indikator Akurasi Data	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (poin)
1	Kelengkapan kode barang	58	93	35
2	Kesesuaian satuan	62	95	33
3	Keakuratan saldo stok	55	91	36
4	Ketepatan klasifikasi	60	94	34
Rata-rata		58,75	93,25	34,5

Sumber: Data hasil uji petik tim pelaksana, 2026.

Peningkatan Akurasi Pengelolaan Persediaan

Berdasarkan data pada Tabel 1, pelaksanaan kegiatan pendampingan menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator akurasi data persediaan. Rata-rata peningkatan yang dicapai sebesar 34,5 poin persentase. Indikator keakuratan saldo stok mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu dari 55% sebelum pendampingan menjadi 91% setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa penerapan standardisasi kode barang, satuan baku, dan klasifikasi persediaan mampu meningkatkan kesesuaian antara data yang tercatat pada sistem dengan kondisi fisik persediaan. Perbandingan hasil pada keempat indikator tersebut disajikan secara visual pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Akurasi Data Persediaan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Peningkatan akurasi data persediaan yang diperoleh melalui kegiatan pendampingan mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan standar pengodean serta pendetailan barang secara konsisten merupakan faktor utama dalam mewujudkan pencatatan persediaan yang andal pada entitas pemerintah (Ismail et al., 2021). Peningkatan pada indikator ketepatan klasifikasi jenis persediaan juga sejalan dengan temuan (Mile & Suwetja, 2022) yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pengungkapan persediaan umumnya disebabkan oleh pengelompokan kategori barang yang belum tepat, bukan karena kesalahan pada tahap pengakuan maupun pengukuran. Dengan demikian, pendampingan teknis dalam penyusunan pedoman kodefikasi barang dinilai lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut dibandingkan hanya melalui kegiatan sosialisasi regulasi.

Selain memberikan peningkatan terhadap indikator kuantitatif, kegiatan pendampingan juga mendorong perubahan pada pemahaman pengurus barang mengenai pengelolaan persediaan. Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian besar pengurus barang masih memahami pencatatan persediaan sebagai kegiatan administrasi rutin tanpa mengaitkannya dengan kualitas penyajian aset lancar dalam laporan keuangan. Setelah kegiatan dilaksanakan, pengurus barang telah mampu menjelaskan dasar penggunaan struktur kode barang serta pentingnya konsistensi satuan dalam menghasilkan laporan mutasi barang yang valid. Perubahan pemahaman tersebut menjadi aspek penting karena keandalan sistem informasi akuntansi persediaan sangat ditentukan oleh kualitas data yang diinput oleh pengurus barang sebagai pelaksana pada tingkat operasional. Kondisi ini sejalan dengan kajian akuntansi sektor publik yang menegaskan bahwa mutu laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh ketertiban administrasi pada level transaksi (Biduri, 2021).

Keberlanjutan hasil pendampingan memerlukan dukungan kebijakan internal dari instansi mitra. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan pedoman kodefikasi barang secara formal serta penetapan penanggung jawab yang melakukan pemutakhiran data secara berkala. Apabila kebijakan tersebut tidak diterapkan, standar yang telah dibangun melalui kegiatan pendampingan berpotensi tidak berjalan secara konsisten, terutama ketika terjadi pergantian pengurus barang. Oleh karena itu, tim pelaksana merekomendasikan agar pedoman hasil pendampingan ditetapkan sebagai bagian dari standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan persediaan sehingga menjadi acuan yang mengikat dalam pelaksanaan administrasi persediaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pendampingan teridentifikasi sepanjang pelaksanaan kegiatan. Salah satu yang paling menentukan adalah dukungan pimpinan

instansi mitra, yang tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada pengurus barang untuk terlibat penuh dalam rangkaian pelatihan dan pendampingan. Dari sudut teknis, aplikasi persediaan yang dipakai instansi mitra pun sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung kebutuhan pencatatan. Dengan kata lain, akar persoalan bukan terletak pada sistem, tetapi pada tingkat kedisiplinan dan konsistensi pengguna dalam menjalankan pencatatan data. Partisipasi aktif pengurus barang sepanjang kegiatan turut menjadi penopang keberhasilan, dan partisipasi ini bahkan semakin menguat setelah mereka memahami keterkaitan antara kesalahan pendetailan data selama ini dengan munculnya temuan pada pemeriksaan internal.

Kendala tidak sepenuhnya terhindarkan dalam pelaksanaan pendampingan ini. Terbaginya waktu pengurus barang antara tugas pelayanan dan kegiatan pendampingan membuat alokasi waktu yang tersedia menjadi sempit. Kebiasaan lama dalam mencatat data persediaan secara manual pun turut menjadi tantangan, sebab pola tersebut sudah berjalan cukup panjang dan tidak mungkin berubah seketika. Ditambah lagi, sejumlah pengurus barang senior yang telah lama menjalankan tugasnya, awalnya menolak penerapan struktur kode barang baru, kode lama dinilai lebih mudah dipakai, meskipun tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Persoalan-persoalan tersebut kemudian ditangani lewat komunikasi yang intensif. Manfaat standarisasi kode barang dijelaskan secara langsung kepada pengurus barang, terutama terkait kemudahan dalam menyusun laporan serta berkurangnya risiko temuan pada saat pemeriksaan berlangsung. Pendekatan semacam ini terbukti mampu meredam penolakan yang sempat terjadi, meski prosesnya berjalan bertahap.

Dokumentasi Kegiatan

Rangkaian kegiatan pendampingan didokumentasikan pada tahapan utama pelaksanaan, yaitu proses pendampingan standarisasi pendetailan data persediaan serta evaluasi dan verifikasi hasil pendampingan. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus bahan evaluasi internal tim pelaksana. Ilustrasi kegiatan disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Pendampingan Standardisasi Pendetailan Data Persediaan



Gambar 3. Evaluasi dan Verifikasi Hasil Pendampingan

Dokumentasi pada Gambar 2 menunjukkan proses pendampingan secara langsung kepada pengurus barang dalam melakukan standardisasi pendetailan data persediaan, meliputi penyesuaian kode barang, satuan, klasifikasi, dan pemutakhiran data pada aplikasi persediaan. Selanjutnya, Gambar 3 memperlihatkan kegiatan evaluasi dan verifikasi hasil pendampingan melalui pengecekan kesesuaian data antara dokumen pendukung, data pada aplikasi, dan hasil pembaruan yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara partisipatif, dengan pengurus barang berperan aktif dalam setiap tahapan pendampingan di bawah bimbingan tim pelaksana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip action research yang menekankan keterlibatan aktif mitra dalam proses perbaikan sehingga hasil pendampingan lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan standardisasi pendetailan data persediaan pada instansi pemerintah mitra di Kota Batam terbukti mampu meningkatkan akurasi pengelolaan persediaan secara signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 34,5 poin persentase pada empat indikator yang diukur, yaitu kelengkapan kode barang, kesesuaian satuan, keakuratan saldo stok, dan ketepatan klasifikasi jenis persediaan. Pendampingan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan pedoman kodifikasi, pelatihan klasikal, hingga pendampingan input data dan evaluasi uji petik, terbukti lebih efektif dibandingkan sosialisasi regulasi semata dalam mengubah kebiasaan pencatatan pengurus barang.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa standardisasi pendetailan data persediaan dapat menjadi salah satu upaya praktis untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah yang lebih andal. Oleh karena itu, instansi mitra disarankan menetapkan pedoman pendetailan data persediaan hasil kegiatan ini sebagai bagian dari standar operasional prosedur (SOP) serta melakukan pemutakhiran data secara berkala guna menjaga keberlanjutan akurasi pengelolaan persediaan. Model pendampingan yang diterapkan juga berpotensi direplikasi pada instansi pemerintah lain yang menghadapi permasalahan serupa dengan menyesuaikan karakteristik jenis persediaan yang dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, S. (2021). Akuntansi Sektor Publik. *Umsida Press*, (0), 1–197. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3).
- Mile, A. W., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 324–325.
- Mulyana, A. E., Hati, S. W., Mulyaningtyas, D., Harlan, F. B., Olifia, J., Hidayat12, R., ... Putra16, P. A. (2023). Peningkatan kinerja UMKM bidang manufaktur melalui pendampingan dan edukasi pengelolaan persediaan bahan baku. *Jdistira*, 3(1), 85–97.
- Zahra, I. A., & Lukman, H. (2025). Evaluasi Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan terhadap Akun Persediaan untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2024. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 672–680.